



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN CIBUNGBULANG

Jl. Raya Cibungbulang KM. 18, Desa Cimanggu Dua, 16630 Telp. (0251) 8647511,  
E-mail:cibungbulang.kec@gmail.com Website : kecamatancibungbulang.bogorkab.go.id

### SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIBUNGBULANG

NOMOR : 4009/ 16 /SPS/Kec/2025  
LAMPIRAN : 1 ( Satu Berkas )

#### TENTANG

#### **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) PAUD AL QUR'AN NURUL BAROKAH KP. CEMPLANG RT 002/006 DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis (SPS) **AL QUR'AN NURUL BAROKAH** yang berlokasi di Kp. Cemplang Rt Rt 002 Rw 006 Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Cibungbulang tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis (SPS) **AL QUR'AN NURUL BAROKAH** yang berlokasi di Kp. Kp. Cemplang Rt Rt 002 Rw 006 Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendélegasián Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 1002/469/Kpts/Per-UU/2023,Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah;
14. Visi Kabupaten Bogor, menjadi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Pengelola Paud **AL QUR'AN NURUL BAROKAH** Nomor : 0001/PAUD AI-QUR'AN.NB/I/2025, Tanggal 20 Januari 2025.

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis ( SPS ) kepada :  
Nama : HAMDAH S.PD.I  
Alamat : Kp.Cemplang Rt 002 Rw 006 Desa Sukamaju Cibungbulang Kabupaten Bogor  
Nama SPS : **AL QUR'AN NURUL BAROKAH**  
Alamat SPS : Kp.Cemplang Rt 002 Rw 006 Desa Sukamaju Cibungbulang Kabupaten Bogor
- KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Satuan Paud Sejenis ( SPS ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin Oprasional di berikan untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun,terhitung sejak Tanggal ditetapkan Keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan
- KETIGA : Dalam hal Satuan Paud Sejenis ( SPS ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cibungbulang  
Pada Tanggal : 5 Februari 2025

An. BUPATI BOGOR  
CAMAT



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekertaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.